

Analisis Pengelolaan Bank Sampah Dalam Perspektif Manajemen Publik

Nazwa Keyla Anindhita*¹
Adrea Aptarizqu Elvaretta²
Fauziah Ramadhani Baktiar³
Syafania Calista Arifin⁴
Meirinawati⁵
Trenda Aktiva Oktarivanda⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: 25040674298@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674299@mhs.unesa.ac.id², 25040674300@mhs.unesa.ac.id³, 25040674304@mhs.unesa.ac.id⁴, meirinawati@unesa.ac.id⁵, trendaoktariyanda@unesa.ac.id⁶

Abstrak

Permasalahan sampah di Indonesia yang terus meningkat mendorong munculnya bank sampah sebagai alternatif pengelolaan berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan bank sampah jika dilihat dari perspektif manajemen publik, sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat perjalanannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal, laporan pemerintah, serta kajian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka fungsi manajemen POSC (planning, organizing, staffing, controlling). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah belum berjalan optimal. Kelemahan paling terlihat terdapat pada aspek perencanaan yang masih bersifat jangka pendek, struktur organisasi yang belum jelas, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sistem pengawasan. Selain itu, sebagian besar bank sampah belum menerapkan prinsip manajemen publik seperti efisiensi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja secara konsisten. Di sisi lain, keberadaan regulasi pemerintah dan dukungan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan bank sampah. Namun demikian, keterbatasan pendanaan, belum adanya standar pengelolaan yang baku, serta koordinasi antar lembaga yang masih lemah menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola berbasis prinsip manajemen publik sangat diperlukan agar bank sampah dapat berfungsi lebih efektif, tidak hanya sebagai gerakan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem layanan publik dalam pengelolaan sampah.

Kata kunci: bank sampah, manajemen publik, pengelolaan sampah, POSC, kebijakan publik

Abstract

The ever-increasing waste problem in Indonesia has spurred the emergence of waste banks as a community-based management alternative. This study aims to examine the management of waste banks from a public management perspective, while also identifying the factors that support and hinder their operation. The method used is qualitative, involving a literature review of various journals, government reports, and relevant previous studies. The analysis was conducted using the POSC (planning, organizing, staffing, controlling) management framework. The results of the study indicate that waste bank management is not yet functioning optimally. The most evident weaknesses lie in short-term planning, an unclear organizational structure, limited human resources, and a weak oversight system. Furthermore, most waste banks have not consistently applied public management principles such as efficiency, accountability, and performance measurement. On the other hand, the existence of government regulations and community support are crucial factors in ensuring the sustainability of waste banks. However, funding constraints, the absence of standardized management protocols, and weak inter-institutional coordination remain major obstacles. This study concludes that strengthening governance based on public management principles is essential so that waste banks can function more effectively, not only as a social movement but also as part of the public service system in waste management.

Keywords: waste banks, public management, waste management, POSC, public policy

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Di Indonesia,

volume sampah terus meningkat setiap tahunnya, dimana sebagian besar berasal dari sektor rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional mencapai sekitar 60–70 juta ton per tahun, namun tingkat pengelolannya masih di bawah 20%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia, sehingga diperlukan upaya alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah menekankan pada kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R) sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah secara berkelanjutan. Konsep ini diimplementasikan melalui keberadaan bank sampah sebagai inisiatif berbasis masyarakat. Bank sampah berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mekanisme pengumpulan dan penukaran sampah yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian Rizki et al. (2025) menunjukkan bahwa bank sampah mampu berkontribusi dalam pengurangan volume sampah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang diterapkan.

Dalam praktiknya, pengelolaan bank sampah masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan penyeteroran sampah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam menjalankan operasional secara maksimal. Kondisi ini diperparah dengan ketidakstabilan finansial yang memengaruhi keberlangsungan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah belum berjalan secara optimal. Kelemahan dalam sistem manajemen organisasi turut memengaruhi rendahnya kinerja bank sampah. Kurangnya evaluasi program secara berkelanjutan juga menjadi kendala dalam upaya perbaikan. Penelitian Rahma dan Weni (2026) menunjukkan bahwa aspek manajerial menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan bank sampah. Selain itu, rendahnya kemampuan pengelola dalam administrasi dan pelaporan keuangan berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Andini & Selvia, 2025).

Perspektif manajemen publik menjadi penting untuk dikaji sebagai pendekatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bank sampah. Manajemen publik menekankan penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Bank sampah sebagai entitas berbasis komunitas yang beririsan dengan layanan publik memerlukan sistem pengelolaan yang profesional agar mampu menciptakan nilai publik yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bank sampah. Pengelolaan yang terarah dan sistematis juga dapat mendukung keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Selain itu, komunikasi lingkungan yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Komunikasi yang baik dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Peningkatan partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Penelitian Parira et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan yang efektif berkontribusi signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bank sampah.

Pengelolaan bank sampah juga dapat dianalisis melalui fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Penerapan fungsi-fungsi tersebut secara optimal berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan bank sampah. Perencanaan yang matang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan program secara jelas. Struktur organisasi yang terorganisir dengan baik mendukung pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih efektif. Pelaksanaan kegiatan yang konsisten turut menentukan keberhasilan operasional bank sampah. Pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kenyataannya, masih banyak bank sampah yang belum memiliki perencanaan yang sistematis. Kondisi ini diikuti dengan struktur organisasi yang kurang jelas dan belum terkelola secara profesional. Mekanisme pengawasan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bank sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bank sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek manajerial dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan bank sampah dari perspektif manajemen publik guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bank sampah sehingga mampu mendukung pengurangan sampah secara berkelanjutan serta menciptakan nilai publik bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*) untuk menganalisis pengelolaan bank sampah dalam perspektif manajemen publik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data non-numerik, sedangkan studi literatur berfokus pada pemanfaatan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka manajemen POSC (*Planning, Organizing, Staffing, Controlling*) yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyril O'Donnell (1984) untuk mengidentifikasi pola pengelolaan, kekuatan, dan kelemahan bank sampah. Populasi penelitian mencakup berbagai literatur terkait pengelolaan bank sampah di Indonesia, termasuk dokumen dari instansi pemerintah, jurnal nasional maupun internasional, serta laporan program daerah. Sampel ditentukan secara purposive berdasarkan relevansi dan kualitas sumber, yang terdiri dari 25 referensi utama meliputi jurnal ilmiah, laporan resmi, studi kasus, dan buku teks. Menurut Suharsimi Arikunto (2013), purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan tahapan pencarian, seleksi, dan klasifikasi data menggunakan kata kunci yang relevan pada database seperti Google Scholar, Sinta, dan Garuda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis meliputi reduksi data melalui pengkodean tematik berdasarkan kerangka POSC, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi teoritik. Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan. Hasil analisis diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pengelolaan bank sampah dengan prinsip manajemen publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kekuatan analisis konseptual dan sintesis literatur yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan memuat interpretasi dan evaluasi terhadap hasil penelitian, serta ulasan berbagai permasalahan terkait yang dipandang dapat memengaruhi hasil penelitian. Deskripsi pada bagian ini menitikberatkan pada analisis secara kritis secara substansial terhadap hasil penelitian, selain itu ditambahkan juga kelemahan dalam penelitian.

Analisis Pengelolaan Bank Sampah Berdasarkan Kerangka POSC

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pengelolaan bank sampah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen POSC secara optimal. Kelemahan paling dominan ditemukan pada aspek *planning*, *staffing*, dan *controlling*, sementara aspek *organizing* menunjukkan variasi implementasi di beberapa daerah.

A. Planning

Sebagian besar bank sampah belum memiliki perencanaan strategis jangka menengah

maupun jangka panjang. Sekitar 80% studi kasus dan laporan yang dianalisis tidak mencantumkan dokumen perencanaan yang sistematis. Perencanaan yang dilakukan cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif, seperti hanya berfokus pada target penimbangan sampah bulanan tanpa adanya proyeksi pengembangan nasabah, diversifikasi produk, maupun strategi keberlanjutan finansial (KLHK, 2022; Safitri et al., 2020). Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip *Public Value Management* yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan capaian nilai publik yang terukur (Denhardt & Denhardt, 2015). Praktik yang lebih baik ditemukan pada bank sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang telah memiliki rencana pengembangan jangka menengah selama tiga tahun dengan indikator kinerja yang jelas, seperti volume sampah, omzet, dan kegiatan edukasi (DLH DKI Jakarta, 2021).

B. Organizing

Aspek pengorganisasian menunjukkan bahwa sebagian besar bank sampah masih memiliki struktur organisasi yang bersifat informal. Dari 25 sumber yang dianalisis, sebanyak 18 sumber menyebutkan tidak adanya pembagian tugas tertulis, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi formal dengan pemerintah setempat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih peran antara pengurus, seperti ketua, bendahara, dan petugas pemilah, yang berdampak pada inefisiensi operasional (Widodo, 2019). Praktik pengelolaan yang lebih terstruktur ditemukan pada Bank Sampah Bersinar di Bandung yang telah mengadopsi sistem organisasi berbasis AD/ART koperasi dengan pembagian tugas yang jelas antara divisi operasional, edukasi, dan keuangan (Hidayati, 2021). Minimnya formalisasi struktur organisasi menyebabkan bank sampah sulit diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan persampahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional.

C. Staffing

Aspek *staffing* menjadi titik kelemahan yang paling signifikan dalam pengelolaan bank sampah. Sebagian besar pengurus bank sampah berasal dari masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, yang bekerja secara sukarela tanpa dukungan remunerasi tetap maupun pelatihan manajerial yang memadai. Sekitar 90% literatur menunjukkan tidak adanya sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, maupun mekanisme insentif berbasis kinerja (Rahmawati & Putra, 2023). Kondisi ini menyebabkan rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan serta menyulitkan penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *New Public Management* (Osborne & Gaebler, 1992). Upaya perbaikan dapat dilihat pada model kemitraan dengan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan oleh Bank Sampah Gemah Ripah di Yogyakarta, yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendampingan dan magang (Suryani, 2022).

D. Controlling

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan bank sampah masih belum berjalan secara optimal. Sebagian besar bank sampah masih menggunakan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan, manipulasi, dan kehilangan data. Dari 25 kasus yang dianalisis, hanya sebagian kecil yang telah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan diaudit secara eksternal (Pratama, 2021). Selain itu, belum adanya indikator kinerja yang terstandar menyebabkan sulitnya evaluasi kontribusi bank sampah terhadap target pengurangan sampah nasional. Kondisi ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya akuntabilitas finansial menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberlanjutan bank sampah (Hidayati, 2021).

Kesesuaian dengan Model Manajemen Publik NPM dan PVM

Hasil analisis konten menunjukkan bahwa sebagian besar bank sampah di Indonesia masih beroperasi dengan pendekatan yang menyerupai *Traditional Public Administration* berbasis komunitas, dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM) maupun *Public Value Management* (PVM). Penerapan prinsip NPM, seperti kontrak kinerja, pengukuran output, efisiensi biaya, dan mekanisme kompetisi, masih sangat terbatas dan umumnya hanya ditemukan pada bank sampah yang telah memiliki badan hukum koperasi (Widodo, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah masih cenderung bersifat konvensional dan belum berorientasi pada kinerja serta hasil yang terukur.

Dalam perspektif PVM, bank sampah memiliki potensi untuk menghasilkan nilai publik yang bersifat ganda, yaitu pengurangan timbunan sampah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, nilai publik tersebut belum diartikulasikan secara sistematis ke dalam indikator kinerja yang terukur dan belum dilaporkan secara transparan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat (Frederickson, 1997). Selain itu, proses dialog antara pengelola bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat dalam merumuskan nilai publik yang ingin dicapai masih sangat terbatas. Ketiadaan mekanisme deliberatif ini menyebabkan pengelolaan bank sampah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif dalam manajemen publik modern.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif manajemen publik modern dengan praktik empiris pengelolaan bank sampah di tingkat komunitas. Ketiadaan orientasi kinerja dan artikulasi nilai publik mengindikasikan bahwa bank sampah belum berkembang menjadi institusi publik yang strategis dan terukur. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajerial, tetapi juga oleh belum optimalnya dukungan sistem tata kelola, seperti regulasi operasional, insentif berbasis kinerja, serta integrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, keterbatasan dalam penerapan prinsip NPM dan PVM mencerminkan persoalan yang bersifat struktural, bukan semata-mata kelemahan internal organisasi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi pengelolaan bank sampah yang menekankan pada penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi lintas sektor guna menciptakan nilai publik yang berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung pertama adalah adanya legitimasi kebijakan yang relatif kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, yang menjadi landasan normatif dalam pengembangan program bank sampah. Selain itu, keberadaan modal sosial berupa jaringan masyarakat di tingkat RT/RW serta kepercayaan terhadap tokoh lokal turut mempermudah proses mobilisasi partisipasi masyarakat pada tahap awal pengelolaan (Suryani, 2022). Perkembangan teknologi, khususnya aplikasi pencatatan digital yang dapat diakses secara gratis, juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat fungsi pengawasan dalam pengelolaan bank sampah.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor penghambat yang masih membatasi optimalisasi pengelolaan bank sampah. Salah satu kendala utama adalah adanya *regulatory gap*, dimana belum tersedia Standar Pelayanan Minimal maupun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) teknis yang secara spesifik mengatur tata kelola bank sampah. Keterbatasan fiskal juga menjadi persoalan, karena sebagian besar bank sampah belum memperoleh dukungan anggaran rutin dari APBD. Selain itu, fragmentasi kelembagaan antara instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, dan Dinas Sosial, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pembinaan dan pendampingan. Faktor lain yang cukup signifikan adalah fluktuasi harga jual sampah di tingkat pengepul, yang berkisar antara Rp50 hingga Rp200 per kilogram, sehingga margin yang diperoleh relatif kecil dan belum mampu menutupi biaya operasional secara berkelanjutan (Rahmawati & Putra, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kebijakan, dukungan pendanaan, serta integrasi kelembagaan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bank sampah.

Kutipan dan Acuan

Secara teoritis, temuan studi ini mengonfirmasi relevansi konsep *public value* yang dikemukakan oleh Mark H. Moore dan Frederickson (1997) dalam konteks sektor lingkungan, khususnya pengelolaan bank sampah. Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih memerlukan operasionalisasi yang lebih konkret melalui indikator kinerja yang terukur agar dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan publik. Selain itu, kerangka manajemen POSC yang dikemukakan oleh Harold Koontz (1984) terbukti efektif sebagai alat analisis diagnostik untuk mengidentifikasi kelemahan manajerial dalam pengelolaan bank sampah, terutama pada aspek perencanaan, pengorganisasian, staffing, dan pengawasan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Widodo (2019) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *New Public Management* dapat meningkatkan efektivitas pengurangan sampah hingga 30%. Di sisi lain, temuan ini juga selaras dengan teori ekonomi sirkular yang dikembangkan oleh Ellen MacArthur Foundation (2013), yang menempatkan bank sampah sebagai salah satu simpul penting dalam rantai daur ulang berbasis komunitas.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu melakukan reposisi terhadap bank sampah dari sekadar kelompok swadaya masyarakat menjadi mitra strategis dalam layanan persampahan melalui skema kontraktual sederhana. Skema tersebut dapat berupa pemberian subsidi operasional yang diimbangi dengan target kinerja yang jelas, seperti volume sampah terkelola dan jumlah kepala keluarga yang dilayani. Tanpa adanya penguatan tata kelola berbasis prinsip manajemen publik, transformasi bank sampah akan sulit bergerak dari sekadar gerakan sosial menuju instrumen kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan bank sampah di Indonesia secara umum belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek manajerial maupun kelembagaan. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka POSC (*Planning, Organizing, Staffing, Controlling*), ditemukan bahwa kelemahan paling dominan terletak pada perencanaan yang belum strategis, pengorganisasian yang masih bersifat informal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta fungsi pengawasan yang belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank sampah masih dikelola secara konvensional dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip manajemen publik yang modern dan terstruktur. Dari perspektif *New Public Management* (NPM), penerapan prinsip efisiensi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas masih sangat terbatas, sedangkan dalam perspektif *Public Value Management* (PVM), nilai publik yang dihasilkan berupa pengurangan sampah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum diukur secara sistematis dalam indikator kinerja yang jelas. Selain itu, berbagai faktor seperti keterbatasan regulasi teknis, minimnya dukungan pendanaan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi turut memperlemah efektivitas pengelolaan bank sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola berbasis manajemen publik yang lebih kolaboratif, terukur, dan berorientasi pada hasil agar bank sampah dapat bertransformasi menjadi instrumen kebijakan publik yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, N. J., & Selvia, F. (2025). Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(3), 281-291.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Bank Sampah di Jakarta. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15(1), 12-25.
- Danar, O. R., Rohmasari, A., & Novita, A. A. (2019). Inovasi pelayanan dalam pengelolaan sampah: Studi pada Bank Sampah Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3).
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.).

Routledge.

- DLH DKI Jakarta. (2021). Laporan kinerja bank sampah binaan tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Hidayati, N. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan bank sampah: Studi pada Bank Sampah Bersinar Bandung. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(2), 112–125.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Statistik Pengelolaan Sampah Nasional 2022*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Laporan Kinerja Program Bank Sampah Nasional 2022*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Status lingkungan hidup Indonesia 2022*. KLHK.
- Koontz, H. (1984). *Management* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (1984). *Principles of Planning: An Introduction to Management* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Palahudin, P., et al. (2024). Sistem manajemen bank sampah sebagai solusi berkelanjutan bagi ekonomi sirkular. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 146–155.
- Parira, R. R., Ginting, E., & Pebriana, R. (2025). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Membangun Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah di Kota Palembang. *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, 16(2), 101-112.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.
- Pratama, A. (2021). Digitalisasi bank sampah melalui aplikasi: Studi kasus Surabaya. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(1), 45–58.
- Rahma, & Weni. (2026). MANAJEMEN BANK SAMPAH LESTARI PADA DESA JATIDUKUH KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI PADA MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 4(1). Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/50930>
- Rahmawati, D., & Putra, I. G. N. A. (2023). Keberlanjutan finansial bank sampah di perkotaan: Analisis margin dan biaya operasional. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 11(1), 22–35
- Rizki, A., Huda, S. N., & Oktaviani, R. (2025). Pengaruh Pembentukan Bank Sampah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Limbah di Desa Cilangkap, Kabupaten Cirebon. *Journal of Community Action*, 1(2), 63-67.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.